



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nama Mata Kuliah	: Hukum Pemerintahan Daerah
Kode Mata Kuliah	: FHk 069
Bobot SKS	: 2 SKS
Semester	: 6
Hari Pertemuan	: 1-16
Tempat Pertemuan	: FH
Koordinator MK	: Mirja Fauzul Hamdi, SH, MH.

1. Manfaat Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan Dasar Hukum dan latar belakang perlunya Pemerintahan Daerah dan ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami Pengertian Otonomi dan Macam-macam Otonomi Daerah
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami Asas dan Prinsip-prinsip Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah, Wilayah dan Penghapusannya
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
6. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami Titik Berat Otonomi Daerah
7. Lembaga-lembaga Daerah dan Sekretariat Daerah
8. Susunan, Fungsi DPRD, dan Sekretariat DPRD
9. Program Legislasi Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah/Qanun
10. Sejarah Pemerintahan Desa/Gampong di Indonesia dan Sejarah Pemerintahan Desa/Gampong Di Propinsi DI Aceh
11. Latar Belakang dan Landasan Yuridis Pemerintahan Desa/Gampong, Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, dan Pemilihan Kepala Desa/Gampong
12. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa/Gampong (LMD)

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah ini disajikan pada semester VII dan berbobot 2 SKS. Hukum Pemerintahan Daerah merunakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada saudara selaku mahasiswa Fakultas Hukum. Materinya meliputi Tujuan dan dasar pembentukan Pemerintahan Daerah, Asas dan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Susunan Unsur, Tugas dan kewajiban Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom, Otonomi khusus, Teori Otonomi daerah, Program Legislasi dan pembentukan Qanun/Perda, Hubungan



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1

Keuangan Pusat dan Daerah dan Hubungan Pengawasan, Pemerintahan Desa dan Susunan, Unsur Pemerintahan Desa/Gampong.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Model: Pembelajaran langsung;

pendekatan : Induktif;

metode: ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi, out door (field trip dll)

5. Materi Pokok

1. Dasar Hukum dan latar belakang perlunya Pemerintahan Daerah dan ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut Pemerintahan Daerah;
2. Pengertian Otonomi dan Macam-macam Otonomi Daerah
3. Asas dan Prinsip-prinsip Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah, Wilayah dan Penghapusannya
5. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia
6. Titik Berat Otonomi Daerah
7. Susunan Pemerintahan Daerah dan Hubungan serta mekanisme pemilihan dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Lembaga-lembaga Daerah dan Sekretariat Daerah
9. Susunan, Fungsi DPRD, dan Sekretariat DPRD
10. Program Legislasi Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah/Qanun
11. Sejarah Pemerintahan Desa/Gampong di Indonesia dan Sejarah Pemerintahan Desa/Gampong Di Propinsi DI Aceh
12. Latar Belakang dan Landasan Yuridis Pemerintahan Desa/Gampong, Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, dan Pemilihan Kepala Desa/Gampong
13. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa/Gampong (LMD)

6. Bahan Bacaan



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

1. Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
2. Ateng Syafrudin, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bina Cipta, Bandung, 1985.
3. -----, Kepala Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
4. Bagir Manan, Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001
5. -----, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Husni Jalil, Eksistensi otonomi Khusus provinsi NAD Dalam Negara Kesatuan RI, Utomo, Bandung, 2005.
7. -----, Langkah-Langkah Dalam Proses Legislasi Serta Hubungan Eksekutif Dan Legislatif, Satker PKK, BRR NAD-NIAS, 2007
8. Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar garfika, Jakarta, 1994.

7. Tugas (10%)

1. Makalah.
2. Presentasi.
3. Baca Buku.

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang; Item Penilaian;
Quis : 10%; Tugas : 20% ; UTS:30 %; UAS: 40 %;

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Pakaian Islami, Perempuan pakai pakaian rok dan jilbab terulur ke dada, laki-laki sopan dan semuanya memakai sepatu.
2. Hadir paling telat 15 menit dengan memberi kabar.
3. Melaksanakan penugasan yang diberikan.
4. Berakhlak baik selama perkuliahan berlangsung.
5. Disiplin terhadap tata tertib.
6. Dosen memberi kabar ke kompas/mahasiswa jika terlambat atau tidak masuk.
7. Saling menghargai di dalam kelas.

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar2. Perkembangan istilah pengungsi3. akhir membaca dan mendiskusikan Dasar Hukum dan latar belakang perlunya Pemerintahan Daerah4. ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut Pemerintahan Daerah Ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut Pemerintahan Daerah	1-2	
2	<ol style="list-style-type: none">1. Asas dan Prinsip-prinsip Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah3. Pembentukan dan Penghapusan Daerah dan Wilayah4. Pra penjajahan5. Masa penjajahan6. Masa kemedekaan7. Setelah reformasi -	3-5	
3	UTS	6	
4	<ol style="list-style-type: none">1. Urusan Pemerintahan (Function)2. Kelembagaan (Institution)3. Personil (Personnel)4. Keuangan Daerah (Local Finance)5. Perwakilan (Representation)6. Pelayanan Publik (Public Service)7. Pengawasan (Control/Supervisio)8. Tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah9. Hubungan wewenang Kepala Daerah dgan Wakil Kepala daerah10. Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah	7-8	
5	<ol style="list-style-type: none">1. Tugas dan wewenang<ol style="list-style-type: none">a. Lembaga Wali Nanggroeb. Lembaga MPUc. Lembaga MAAd. Lembaga MPD2. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris daerah & Kepala Dinas/Badan/ kantor3. Hak-hak DPRD4. Fungsi Legislatif	9-10	



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	Hubungan DPRD dengan Eksekutif		
6	1. Dasar Hukum Prolega 2. Tujuan Prolega 3. Perencanaan Perda/Qanun 4. Pembahasan 5. Pengundangan 6. Pra penjajahan 7. Masa penjajahan 8. Masa kemedekaan 9. Setelah reformasi	11-13	
7	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Gampong 2. Unsur-unsur Pemerintahan Desa/Gampong 3. Kepala Desa/Gampong 4. Sekretaris Desa/Gampong 5. Tugas dan wewenang LMD 6. Mekanisme rekuritmen anggota LMD	14-15	
9	Ujian Akhir Semester	16	

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, aka nada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

(Mirja Fauzul Hamdi.,SH.,MH)
NIP. 198802012015041004

Pihak II
Komlas

(.....)
NIM.

Mengetahui
Koordinator Mata Kuliah

(Mirja Fauzul Hamdi.,S.H.,M.H)
NIP. 198802012015041004



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Darussalam, Banda Aceh

DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016

Tanggal dikeluarkan :

Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala

No. Revisi : 1